



RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jambi Tahun 2026 telah selesai disusun, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan secara operasional perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yang berfungsi menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Provinsi Jambi dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jambi tahun 2025-2029 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jambi yang berisikan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025-2029, dan digunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI



Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731212 199302 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	52
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	58
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	58
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	59
	3.3 Program dan Kegiatan	63
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	81
BAB V	PENUTUP	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada pasal 13 ayat (2) dalam Permendagri yang sama disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Proses penyusunan Renja dimulai dari tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada RKPD, Rensta Perangkat Daerah dan Renja Kementerian/Lembaga terkait yang kemudian diharapkan menjadi pedoman dalam proses penyusunan RKA, KUA PPAS dan RAPBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 1 huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup Penelaahan dokumen Rancangan Awal. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Awal Tahun Anggaran 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down, bottom-up dan money follow program. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) melalui musrenbang, Pendekatan politis adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berupa kebijakan-kebijakan kepala daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), hasilnya akan diselaraskan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sistem penganggaran sebelumnya masih menggunakan sistem money follow function, dimana anggaran mengikuti tugas dan fungsi pada kementerian lembaga. Sejak tahun 2023, anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

berorientasi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, inilah yang disebut Money Follow Program, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran.

Melalui pendekatan ini diharapkan :

1. Adanya skala prioritas alokasi yang tinggi pada program-program yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat;
2. Program dan kegiatan yang akan didanai lebih tegas dan jelas, sehingga jelas sasaran yang akan dicapai lebih optimal dan teratur;
3. Mendorong terciptanya efisiensi melalui koordinasi yang jelas antar program dan kegiatan.

Konsep money follow program menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Identifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Identifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA, KUA PPAS dan RAPBD Disperidag Provinsi Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Secara umum pada tahun 2024, terdapat 1 indikator kinerja yang tidak memenuhi target. Sementara 1 indikator kinerja memenuhi target dan 5 indikator kinerja lainnya melebihi target. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Evaluasi
			Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	8,00	9,77	124,63	Melebihi Target
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	0,43	5,52	1283,72	Melebihi Target
2	Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4,66	7,38	158,37	Melebihi Target
3	Meningkatkannya Nilai Ekspor Non Migas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	1	0,697	76,17	Tidak Memenuhi Target
		Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	6,00	6,74	112,3	Melebihi Target
4	Meningkatnya kualitas Kinerja Pelayanan eksternal dan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag	79,00	85	107,59	Melebihi Target

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

	internal organisasi					
5	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	BB	BB	BB (70,15)	memenuhi target

Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan, secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menunjukkan capaian yang bervariasi, dengan beberapa indikator melampaui target, sementara sebagian lainnya belum tercapai.

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Pertumbuhan Industri

- **Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB** tercapai sebesar **9,77%**, melebihi target **8,00%** atau **124,63%** dari target.
- **Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas** mencapai **5,52%**, jauh melampaui target **0,43%** atau **1.283,72%** dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan adanya penguatan kinerja sektor industri pengolahan nonmigas yang signifikan sepanjang tahun 2024.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri

- **Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan** mencapai **7,38%**, melebihi target **4,66%** atau **158,37%** dari target. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas perdagangan domestik yang cukup tinggi di Provinsi Jambi.

3. Sasaran Strategis: Meningkatkan Nilai Ekspor Nonmigas

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

- **Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas** hanya terealisasi sebesar **0,697 miliar USD** dari target **1 miliar USD**, atau **76,17%** dari target.
- **Pertumbuhan Nilai Ekspor Nonmigas** mengalami kenaikan sebesar 6,74%, jauh di atas target pertumbuhan positif **6,00%**, atau hanya **112,3%** dari target. Mencerminkan peningkatan aktivitas ekspor provinsi Jambi, Capaian ini menunjukkan upaya strategis dalam meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar ekspor produk nonmigas, terutama menghadapi dinamika pasar global yang fluktuatif.

4. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi

- **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap pelayanan Disperindag tercapai sebesar **85**, melampaui target **79** atau **107,59%** dari target. Hal ini menggambarkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.

5. Sasaran Strategis: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

- **Nilai SAKIP** pada tahun 2024 berada pada predikat **BB** dengan skor **70,15**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi berjalan sesuai standar yang diharapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis telah melebihi target, khususnya pada sektor industri, perdagangan dalam negeri, dan pelayanan publik. Namun demikian, capaian di bidang ekspor nonmigas masih memerlukan perhatian serius melalui peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk, serta perluasan akses pasar internasional.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

Dari data diatas dapat dijabarkan bahwa:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi tidak memenuhi target kinerja Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas.

Hal ini disebabkan menurunnya lapangan usaha sebagai penyerap tenaga kerja. Disamping itu, faktor lain seperti kesesuaian/kualitas SDM, sulitnya memperoleh bahan baku dan sistem pengelolaan keuangan yang kurang baik menyebabkan beberapa industri yang berhenti produksi.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah merencanakan/menganggarkan untuk:

- 1) Pelatihan-pelatihan yang diperlukan dalam menyesuaikan/meningkatkan kualitas SDM; dan
- 2) Bantuan berupa alat untuk membantu dan melancarkan usaha IKM sesuai dengan kebutuhan.

- b. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi target Kinerja Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Hal ini disebabkan oleh pemahaman atas formula perhitungan IKU dan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan pengawasan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah merencanakan/menganggarkan untuk:

- 1) Kegiatan sosialisasi untuk memahami formula perhitungan IKU; dan
- 2) Mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada.

- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kurang optimal memenuhi target Kinerja Nilai SAKIP (Belum melebihi target Nilai SAKIP).

Hal ini disebabkan oleh pemahaman terhadap komponen dan bobot penilaian. Selain itu, dokumen yang kurang lengkap juga menjadi kendala dalam proses penilaian.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah merencanakan/menganggarkan untuk:

- 1) Mengikuti diklat/bimbingan teknis/sosialisasi terkait SAKIP; dan
 - 2) Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penilaian SAKIP.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
- a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melalui Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan serta Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya telah memenuhi target Kinerja Persentase Kinerja Realisasi Pupuk.

Hal ini disebabkan oleh tercapainya target Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk meningkatkan kerja sama dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi.
 - b. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan melalui Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar telah memenuhi target Kinerja Tertib Usaha.

Hal ini disebabkan oleh kepedulian dan komitmen untuk menyelesaikan rekomendasi yang sesuai dengan peruntukannya.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk mempertahankan/

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

meningkatkan kepedulian dan komitmen dalam menyelesaikan rekomendasi yang sesuai dengan peruntukannya.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi; Subkegiatan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat serta Sub kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri melebihi target Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB dan Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas.

Untuk Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB melebihi target, dibawah ini tabel Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB Tahun 2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
2024	8,00	9,77	124,63	Melebihi Target

Pada tahun 2024, kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi mencapai **9,77%**, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **8,00%** atau setara **124,63%** dari target.

Capaian ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan nonmigas mampu memberikan peran signifikan dalam struktur perekonomian daerah, terutama melalui peningkatan nilai tambah produk hasil olahan sumber daya lokal. Kinerja ini juga mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas industri yang lebih cepat dibandingkan proyeksi awal, didukung oleh iklim usaha yang kondusif, ketersediaan bahan baku, dan meningkatnya permintaan domestik.

Keberhasilan ini menjadi modal penting bagi Provinsi Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan industri daerah di tengah persaingan pasar nasional maupun global.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk mempertahankan/meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pencapaian target kinerja.

- b. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota melebihi target kinerja Kinerja Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen, Kinerja Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku dan Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Disperindag.

Hal ini disebabkan oleh:

- 1) Komitmen untuk hadir dan melindungi hak-hak konsumen menjadi penting dalam usaha penyelesaian pengaduan konsumen;
- 2) Keberadaan UPTD BPSMB, memudahkan proses-proses pengujian sampel sehingga dapat dilihat apakah komoditi yang diuji sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak; dan
- 3) Pemahaman akan pelayanan dan kesadaran dalam melayani merupakan unsur pendukung dalam capaian indeks IKM.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk mempertahankan/meningkatkan:

- 1) Komitmen untuk hadir dan melindungi hak-hak konsumen;
 - 2) Mengoptimalkan keberadaan UPTD BPSDM dalam menguji komoditi potensial; dan
 - 3) Pemahaman akan pelayanan dan kesadaran dalam melayani para pemangku kepentingan.
- c. Program Pengembangan Ekspor melalui Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi melebihi target Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan nilai ekspor batu bara, karet dan olahannya serta minyak nabati.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk mempertahankan/meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pencapaian target kinerja.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dengan memperhitungkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Kinerja Tahun 2024, baru 4 dari 7 indikator kinerja yang telah melebihi target renstra. Selebihnya belum memenuhi target. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Evaluasi
			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	9,77	8,3	117,7	Melebihi Target
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	5,52	1,27	434,6	Melebihi Target
2	Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7,38	5	147,6	Melebihi Target
3	Meningkatkannya	Nilai Ekspor Produk Industri	0,697	1,034	67,4	Tidak

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

	Nilai Ekspor Non Migas	Pengolahan Nonmigas				Memenuhi Target
		Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	6,74	30	22,46	Tidak Memenuhi Target
4	Meningkatnya kualitas Kinerja Pelayanan eksternal dan internal organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag	85	81	104,9	Melebihi Target
5	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	BB	BB	BB (70,15)	memenuhi target

Dari data diatas dapat dijabarkan bahwa:

Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja strategis hingga tahun berjalan 2024, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Disperindag Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang positif, terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan dalam negeri, dan peningkatan kualitas pelayanan.

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Pertumbuhan Industri

- **Persentase kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB** tahun 2024 tercatat sebesar **9,77%**, melampaui target Renstra tahun 2026 sebesar 8,3%, dengan tingkat capaian **117,7%**. Hal ini menunjukkan kontribusi sektor industri

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

pengolahan nonmigas terhadap perekonomian daerah terus mengalami peningkatan.

- **Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan nonmigas** mencapai **5,52%**, jauh melebihi target Renstra tahun 2026 sebesar 1,27%, dengan tingkat capaian **434,6%**. Capaian ini mencerminkan adanya penguatan kapasitas produksi dan nilai tambah di sektor industri pengolahan.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri

- **Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan** mencapai **7,38%**, melampaui target Renstra tahun 2026 sebesar 5%, dengan capaian **147,6%**. Hal ini menandakan bahwa aktivitas perdagangan di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari rencana awal.

3. Sasaran Strategis: Meningkatkan Nilai Ekspor Nonmigas

- **Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas** tercatat **USD 0,697 miliar**, atau 67,4% dari target Renstra tahun 2026 sebesar USD 1,034 miliar, sehingga belum memenuhi target.
- **Pertumbuhan nilai ekspor nonmigas** hanya mencapai **6,74%**, jauh di bawah target 30%, dengan capaian 22,46%. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan daya saing produk ekspor, perluasan pasar, serta peningkatan kualitas dan inovasi produk industri pengolahan.

4. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi

- **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap pelayanan Disperindag tahun 2024 mencapai **85 poin**, melampaui target 81 poin, dengan capaian **104,9%**. Ini menunjukkan pelayanan publik yang diberikan Disperindag Provinsi Jambi mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat.

5. Sasaran Strategis: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

- **Nilai SAKIP** berada pada kategori **BB (70,15)**, sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis telah **melampaui target**, terutama pada sektor industri, perdagangan, dan pelayanan publik. Namun, indikator pada sektor ekspor nonmigas masih perlu mendapatkan perhatian serius melalui peningkatan promosi, pengembangan pasar ekspor, serta penguatan kualitas dan daya saing produk industri daerah.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya	100,00	%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah pengendalian usaha perdagangan	75,00	Pelaku Usaha	4,00	3,00	75,00%	13,00	16,00	21,33
3.30.02.1.03.02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	35,00	Dokumen	4,00	3,00	75,00%	6,00	9,00	25,71

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	94,00	%	90,00	91,00	101,11%	91,00	91,00	96,81
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,90	%	5,90	5,90	100,00%	5,90	5,90	100,00
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Periode pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	72,00	Bulan			#DIV/0!	12,00	12,00	
3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	11,00	Laporan			#DIV/0!	11,00	11,00	
3.30.04.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	36,00	Laporan			#DIV/0!	6,00	6,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Periode pengendalian harga dan informasi ketersediaan stok Bapok dan Bapokting	72,00	Bulan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	2,00	Laporan	4,00	4,00	100,00%	-	4,00	200,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.30.04. 1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	56,00	Laporan	11,00	11,00	100,00%	11,00	22,00	39,29
---------------------	--	---	-------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	-------

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.30.04. 1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan Pupuk Bersubsidi	11,00	Kab/Kota	11,00	11,00	100,00%	11,00	11,00	100,00
3.30.04. 1.03.01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	50,00	Laporan	6,00	6,00	100,00%	8,00	14,00	28,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.30.04. 1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	66,00	Laporan	11,00	11,00	100,00%	11,00	22,00	33,33
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	30,00	%	6,00	31,79	529,83%	6,00	37,79	125,97
3.30.05. 1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Produk Ekspor Unggulan Provinsi Jambi	34,00	Produk	6,00	-	0,00%	6,00	6,00	17,65
3.30.05. 1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	500,00	Pelaku Usaha	100,00	100,00	100,00%	100,00	200,00	40,00
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100,00	%	93,00	100,00	107,53%	100,00	100,00	100,00
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	51,10	%	41,00	5,70	13,90%	41,80	41,80	81,80

		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	70,00	%	60,00	98,28	163,80%	62,00	62,00	88,57
		Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	81,00	(indeks B)	77,00	79,97	103,86%	78,00	78,00	96,30
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	11,00	Kab/Kota	11,00	11,00	100,00%	11,00	11,00	100,00
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2,00	BPSK	3,00	3,00	100,00%	3,00	6,00	300,00
3.30.06.1.01.02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	10,00	LPKSM			#DIV/0!	2,00	2,00	
3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	260,00	Pengaduan	40,00	40,00	100,00%	40,00	80,00	30,77
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di	Jumlah pengujian mutu produk	15.654,00	Parameter	2.395,00	2.509,00	104,76%	2.515,00	5.024,00	32,09
		Jumlah PAD jasa Pelayanan	1.537.507.337,00		278.250.000,00	217.160.000,00	78,04%	298.000.000,00	515.160.000,00	33,51

	Seluruh Kabupaten/Kota	Daerah	Laboratorium								
			Periode Penerapan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Terakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017	72,00	Bulan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
			Periode Layanan Pengujian dan Kalibrasi di UPTD BPSMB	72,00	Bulan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk		Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	352,00	Komoditi	44,00	44,00	100,00%	55,00	99,00	28,13
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	15.654,00	Dokumen	2.509,00	2.509,00	100,00%	2.515,00	5.024,00	32,09
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Layanan	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	16,00	Sertifikat	4,00	4,00	100,00%	2,00	6,00	37,50
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Layanan	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	99,00	Sertifikat	15,00	15,00	100,00%	487,00	502,00	507,07
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan barang beredar/atau jasa	11,00	Kab/Kota	11,00	11,00	100,00%	11,00	11,00	100,00
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	54,00	Laporan	9,00	9,00	100,00%	9,00	18,00	33,33
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

										(10/4)
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri	65,00	%	45,00	100,00	222,22%	50,00	50,00	76,92
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi penggunaan Produk dalam Negeri	20,00	Kali	5,00	-	0,00%	5,00	5,00	25,00
3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	36,00	UMKM	9,00	9,00	100,00%	6,00	15,00	41,67
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Mou Kemitraan UKM	60,00	Dokumen			#DIV/0!	5,00	5,00	8,33
3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	59,00	UMKM			#DIV/0!	5,00	5,00	8,47

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

								Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Informasi Perdagangan	11,00	Kab/Kota			#DIV/0!	11,00	11,00	100,00
3.30.07.1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	10,00	Dokumen			#DIV/0!	2,00	2,00	20,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	1,00	persen	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	200,00
		Persentase Pertumbuha n PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0,48	persen	0,39	3,05	782,05%	0,41	3,46	720,83
		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	8,30	persen	7,86	9,77	124,30%	7,97	7,97	96,02
		nilai ekspor non migas	1,034	US\$ Milyar	0,966	0,97	100,21%	0,98	0,98	95,07
		Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (PMA dan PMDN)	0,93	Triliun	0,53	2,10	398,48%	0,63	0,63	67,96

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	84,00	persen	80,00	107,26	134,08%	81,00	81,00	96,43
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (orang)	278.533	orang	250.977,00	75.801,00	30,20%	257.866,00	257.866,00	92,58
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	84,00	%	80,00	107,26	134,08%	81,00	188,26	224,12
		Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	5,00	%	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	40,00
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	50,00	Dokumen	2,00	2,00	100,00%		2,00	4,00
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	110,00	Dokumen	20,00	20,00	100,00%	3,00	23,00	20,91

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

	Sumber Daya Industri	Pembangunan Sumber Daya Industri								
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	28,00	Dokumen			#DIV/0!	6,00	6,00	21,43
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	75,00	Dokumen	15,00	15,00	100,00%	5,00	20,00	26,67
3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,00	Dokumen	11,00	11,00	100,00%	11,00	22,00	33,33
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin sesuai kewenangan yang dikendalikan	20,00	%	20,00	20,00	100,00%	20,00	20,00	100,00
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	%	20,00	20,00	100,00%	100,00	120,00	120,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00		-	-	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00		-	-	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	160,00	Perusahaan	20,00	16,00	80,00%	30,00	46,00	28,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	25,00	%	5,00	5,00	100,00%	10,00	10,00	40,00
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data dan Informasi Industri Berbasis SIINas	6.690,00	Unit	1.115,00	-	0,00%	1.115,00	1.115,00	16,67
		Periode penyampaian informasi Industri Kewenangan Provinsi	72,00	Bulan	12,00	12,00		12,00	24,00	33,33
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	6,00	Dokumen	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	33,33

3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP	BB		BB	CC	0,74%	B	97,13	97,13
		Predikat AKIP Perangkat Daerah	Predikat AKIP		-	-		Predikat AKIP		
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	42,00	Dokumen	6,00	6,00	100,00%	7,00	13,00	30,95
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	36,00	Dokumen	6,00	6,00	100,00%	6,00	12,00	33,33
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.31.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			#DIV/0!	6,00	6,00	#DIV/0!
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,00	Laporan	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	33,33
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Keuangan	72,00	Bulan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84,00	Orang/ Bulan	14,00	14,00	100,00%	14,00	28,00	33,33
3.31.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72,00	Dokumen	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.31.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30,00	Dokumen	5,00	5,00	100,00%	4,00	9,00	30,00
3.31.01.1.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	18,00	Dokumen	3,00	3,00	100,00%	-	3,00	16,67
3.31.01.1.03.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18,00	Unit	3,00	3,00	100,00%	-	3,00	16,67
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jambi	1.013,00	Orang	165,00	104,00	63,03%	175,00	279,00	27,54
3.31.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5,00	Paket			#DIV/0!	1,00	1,00	20,00
3.31.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	30,00	Dokumen	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	33,33
3.31.01.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas		Orang/Kali			50,00%			

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

1.05.09	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180,00		30,00	15,00		30,00	45,00	25,00
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72,00	Bulan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	115,00	Paket	20,00	12,00	60,00%	1,00	13,00	11,30
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72,00	Paket	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30,00	Paket	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	33,33
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360,00	Dokumen	60,00	60,00	100,00%	60,00	120,00	33,33
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.008,00	Laporan	168,00	128,00	76,19%	12,00	140,00	13,89
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72,00	Bulan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.000,00	Laporan	3.500,00	3.000,00	85,71%	12,00	3.012,00	14,34

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.31.01. 1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72,00	Laporan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01. 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72,00	Laporan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	72,00	Bulan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01. 1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	125,00	Unit	25,00	25,00	100,00%	30,00	55,00	44,00
3.31.01. 1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	185,00	Unit	20,00	20,00	100,00%	20,00	40,00	21,62

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

1.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci Urusan Pedagangan Provinsi dan Urusan Perindustrian Provinsi yang dijalankan oleh Dinas Perindutrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Beberapa indicator tersebut, disajikan pada table berikut ini.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindutrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

NO	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah				RealisaiCapaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Perdagangan										
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	6,00	6,00	6,00	6,00	31,79	6,00	6,00	6,00	Sesuai Rencana
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	93,00	93,00	95,00	97,00	100,00	93,00	95,00	97,00	Sesuai Rencana
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	62,00	62,00	66,00	67,00	98,28	62,00	66,00	67,00	Sesuai Rencana
4	Tertib Usaha	60,00	60,00	60,00	62,00	60,00	60,00	60,00	62,00	Sesuai Rencana
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	91,00	91,00	92,00	92,00	91,00	91,00	92,00	92,00	Sesuai Rencana
6	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	41,80	41,80	43,25	46,60	40,00	41,80	43,25	46,60	Sesuai Rencana
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,90	5,90	5,90	5,90	2,81	5,90	5,90	5,90	Sesuai Rencana
Urusan Perindustrian										
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Sesuai Rencana
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	80,00	81,00	82,00	83,00	64,30	81,00	82,00	83,00	Sesuai Rencana
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Sesuai Rencana
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	100,00	100,00	100,00	Pada Tahun 2023 Tidak Ada IPUI

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

NO	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah				RealisasiCapaian			Proyeksi	CatatanAnalisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	100,00	100,00	100,00	Pada Tahun 2023 Tidak Ada IPKI
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	5,00	10,00	15,00	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00	Sesuai Rencana

1.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi (Disperindag) Jambi. Disperindag memiliki tugas penting dalam mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan lokal, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelaku usaha dan masyarakat. Untuk Tahun 2024 dan tahun-tahun lainnya, kinerja diharapkan sesuai dengan rencana.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 :

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menunjukkan capaian kinerja yang bervariasi, baik dalam indikator pembangunan industri pengolahan, pengawasan perdagangan, ekspor, hingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Disperindag.

1. Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB secara konsisten meningkat. Pada tahun 2024, kontribusi mencapai 9,97% melampaui target sebesar 8,08%, dengan rasio capaian sebesar **123,39%**, yang menandakan kinerja sangat baik dalam mendorong kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah.

Namun demikian, **pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan nonmigas** menunjukkan ketidakkonsistenan. Meskipun pertumbuhan tahun 2024 mencapai 5,52%,

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

jauh melampaui target 0,43%, capaian tahun-tahun sebelumnya sangat fluktuatif. Ini menyebabkan rasio capaian sangat ekstrem pada 2022 dan 2023, yakni **55.200%** dan **154.321%**, mencerminkan tantangan dalam perencanaan target yang realistis.

2. Ketenagakerjaan Industri

Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan belum mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2024, realisasi hanya mencapai 78.085 dari target 264.755 tenaga kerja atau sekitar **29,49%**, menunjukkan masih rendahnya serapan tenaga kerja di sektor ini yang dapat menjadi perhatian utama untuk periode berikutnya.

3. Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

Dalam hal **penanganan pengaduan konsumen**, kinerja sangat baik dan konsisten dengan realisasi mencapai atau bahkan melampaui target setiap tahunnya (100% pada 2024).

Pengawasan barang beredar dan komoditi potensial yang sesuai ketentuan juga mengalami peningkatan tajam. Pada 2024, realisasi pengawasan barang mencapai **88,71%**, melampaui target 46,6% dengan rasio capaian **190,36%**. Demikian pula dengan komoditas potensial yang sesuai ketentuan, yang mencapai **98,83%**, jauh di atas target sebesar 67%, dengan rasio capaian **147,51%**.

4. Dukungan terhadap Sektor Pertanian dan Usaha Tertib

Capaian **kinerja realisasi pupuk** secara umum cukup baik, dengan angka capaian tahun 2024 sebesar 86,91% dari target 92% (rasio 94,47%). Sementara indikator **tertib usaha** mencapai 100% selama dua tahun berturut-turut (2023–2024), menunjukkan kepatuhan dan pengawasan usaha yang optimal.

5. Kinerja Ekspor

Capaian nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas pada tahun 2024 masih belum memenuhi target. Realisasi hanya mencapai 0,697 dari target 1,017 (rasio **68,53%**). Lebih mencolok, **pertumbuhan nilai ekspor nonmigas** menunjukkan nilai negatif sepanjang sebagian besar periode, dengan tahun 2024 mencatat -24,2% pertumbuhan dari target 6%, atau rasio capaian **-394,08%**, mencerminkan tekanan besar dari faktor eksternal dan perlunya diversifikasi serta penguatan struktur ekspor daerah.

6. Kepuasan Masyarakat dan Akuntabilitas Kinerja

Tingkat **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap pelayanan Disperindag menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2024, IKM mencapai **85** dengan rasio capaian **107,59%**, menandakan kepuasan publik yang tinggi terhadap layanan yang diberikan.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

Dari sisi **nilai SAKIP**, Disperindag Provinsi Jambi mempertahankan kategori “BB” selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024), mencerminkan kinerja akuntabilitas yang stabil dan cukup baik, meskipun sempat turun menjadi “CC” pada tahun 2021.

Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menunjukkan **kinerja yang cukup baik dan progresif** dalam hal pelayanan publik, pengawasan perdagangan, dan akuntabilitas kinerja. Namun, beberapa indikator strategis seperti penyerapan tenaga kerja industri dan ekspor nonmigas masih menghadapi tantangan signifikan. Oleh karena itu, fokus kebijakan mendatang perlu diarahkan pada penguatan daya saing industri, fasilitasi ekspor, dan penciptaan lapangan kerja melalui hilirisasi sektor industri yang lebih terintegrasi.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang positif dan semakin responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Ke depan, Dinas Perindag berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berbasis data demi mewujudkan sektor industri dan perdagangan yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

1.3.2 Koordinasi dan Sinergi Program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta Dengan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Pembangunan

Untuk Koordinasi dan Sinergi Program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta Dengan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Pembangunan telah dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun Anggaran 2026. Rakortekrenbang dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025. Sedangkan, Rakortekrenbang dengan Pemerintah Pusat telah dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2025 dengan hasil sebagaimana terdapat dalam table berikut.

**Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan
Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi**

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Urusan	Target Renstra	Hasil Rakortek-renbang	Catatan
Urusan Perdagangan				
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	6,0	6,0	Tetap (dibawah target nasional 7,86%)
2	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	46,60	55,00	Naik (mengikuti target nasional 55%)
3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	95,00	92,00	Turun (mengikuti target nasional 92%)
4	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	66,00	75,00	Naik (mengikuti target nasional 75%)
5	Tertib Usaha	60,00	90,00	Naik (mengikuti target nasional 90%)
6	Persentase kinerja realisasi pupuk	92,00	90,00	Turun (mengikuti target nasional 90%)
7	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	5,90	5,90	Tetap (sama dengan target nasional 5,9%)
8	Inflasi Pangan Bergejolak	5,00	5,00	Tetap (sama dengan target nasional 5%)
9	Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)	48,00	50,00	Naik (mengikuti target nasional 50%)
Urusan Perindustrian				
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0,43	0,43	Tetap (dibawah target nasional 8,4%)
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	8,08	8,08	Tetap (dibawah target nasional 18,9%)
3	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	0,93	1,00	Naik (target nasional 181,59 USD Miliar)
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Orang)	264.755	83.683	Turun (target nasional 21,95 juta orang)
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	0,727	2,7	Naik (target nasional 613,85 USD Miliar)

1.3.3 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah disajikan berdasarkan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas

a. Permasalahan

- Masih rendahnya diversifikasi produk industri pengolahan nonmigas sehingga kontribusi pertumbuhan bergantung pada komoditas tertentu.
- Pertumbuhan tinggi tetapi belum merata di semua subsektor, dominasi masih pada industri berbasis sumber daya alam.

b. Hambatan

- Keterbatasan investasi di sektor hilir dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi modern oleh pelaku industri.
- Keterbatasan SDM industri yang memiliki kompetensi teknologi dan inovasi, serta minimnya fasilitas riset dan pengembangan.

2. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

a. Permasalahan

- Aktivitas perdagangan cukup tinggi, namun sebagian besar masih bersifat lokal dan belum terkoneksi kuat ke rantai pasok nasional/internasional.

b. Hambatan

- Infrastruktur distribusi dan logistik yang belum merata, serta ketergantungan pada komoditas primer sebagai barang dagangan utama.

3. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas

a. Permasalahan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

- Nilai ekspor masih di bawah target karena permintaan global yang fluktuatif dan daya saing produk yang terbatas.
- b. Hambatan**
 - Akses pasar ekspor yang terbatas, kurangnya promosi internasional, dan keterbatasan sertifikasi mutu produk sesuai standar negara tujuan.
- 4. Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas**
 - a. Permasalahan**
 - Pertumbuhan ekspor lambat akibat penurunan harga komoditas global dan keterbatasan variasi produk bernilai tambah tinggi
 - b. Hambatan**
 - Hambatan tarif dan non-tarif di negara tujuan, biaya logistik tinggi, serta ketergantungan pada pasar tradisional yang rentan.
- 5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag**
 - a. Permasalahan**
 - Meskipun capaian tinggi, masih terdapat keluhan terkait kecepatan layanan dan kemudahan akses informasi.
 - b. Hambatan**
 - Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan belum meratanya literasi digital masyarakat.
- 6. Nilai SAKIP**
 - a. Permasalahan**
 - Konsistensi pelaksanaan manajemen kinerja sudah baik namun masih ada beberapa unit kerja yang belum optimal dalam penyusunan laporan kinerja berbasis hasil.
 - b. Hambatan**
 - Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan data kinerja dan pemanfaatan aplikasi monitoring serta evaluasi.

1.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah disajikan berdasarkan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB

- a. Tantangan

Keterbatasan investasi pada sektor industri pengolahan non migas, infrastruktur pendukung industri yang belum merata, serta ketergantungan pada bahan baku dari luar daerah.

- b. Peluang

Potensi pengembangan hilirisasi komoditas unggulan daerah, dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk industrialisasi, serta peluang pasar domestik dan ekspor yang terus berkembang.

2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas

- a. Tantangan

Fluktuasi harga komoditas global yang mempengaruhi industri pengolahan, rendahnya adopsi teknologi produksi, dan keterbatasan SDM industri terampil.

- b. Peluang

Meningkatnya minat investor di sektor pengolahan, tren diversifikasi produk, serta dukungan program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja industri.

3. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

- a. Tantangan

Persaingan ketat dengan platform perdagangan digital luar daerah, infrastruktur logistik yang belum optimal, dan daya beli masyarakat yang fluktuatif..

- b. Peluang

Perluasan pasar melalui e-commerce lokal, potensi pertumbuhan UMKM perdagangan, serta dukungan regulasi dan promosi dagang dari pemerintah.

4. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas

a. Tantangan

Keterbatasan akses pasar internasional, kendala sertifikasi produk, dan biaya logistik ekspor yang tinggi..

b. Peluang

Peningkatan permintaan produk olahan berbasis sumber daya alam, perjanjian perdagangan internasional yang menguntungkan, serta dukungan fasilitasi ekspor dari pemerintah.

5. Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas

a. Tantangan

Volatilitas (tingkat variasi rangkaian harga perdagangan dari waktu ke waktu) permintaan global, perubahan kebijakan dagang negara tujuan, dan persaingan produk sejenis dari negara lain.

b. Peluang

Diversifikasi pasar tujuan ekspor, inovasi produk bernilai tambah, serta promosi dagang internasional yang semakin intensif.

6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag

a. Tantangan

Perbedaan harapan dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan, keterbatasan SDM pelayanan publik, dan adopsi layanan digital yang belum merata.

b. Peluang

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, program peningkatan kapasitas pegawai, dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi layanan.

7. Nilai SAKIP

a. Tantangan

Pemahaman yang belum merata terhadap manajemen kinerja di seluruh unit, konsistensi pengumpulan data kinerja, dan keterbatasan integrasi sistem pelaporan.

b. Peluang

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

Dukungan regulasi dan pedoman SAKIP dari pemerintah pusat, ketersediaan aplikasi monitoring kinerja, serta peluang peningkatan melalui evaluasi dan pendampingan teknis.

1.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026

Formulasi isu-isu penting dalam perumusan Program dan Kegiatan Prioritas 2024 mengacu kepada indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah bagaimana meningkatkan Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas. Peningkatan ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 1) Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

b. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

- 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

c. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

- 1) Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

2. Persentase penanganan pengaduan konsumen

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah mempertahankan capaian kinerja persentase penanganan pengaduan konsumen. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- 1) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

3. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan kinerja Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperbanyak jumlah barang ber SNI Wajib yang diawasi. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

4. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- 1) Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

5. Persentase kinerja realisasi pupuk

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait serta pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam aspek legalitas dan ketepatan penyaluran/penggunaan pupuk bersubsidi, terutama di level pengecer dan kelompok tani. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING

- 1) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

6. Tertib Usaha

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan prosedur perizinan. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- 1) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor
- 2) Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
- 3) Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer
- 4) Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

7. Pertumbuhan nilai ekspor non migas

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah mempertahankan/meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor non migas. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

- 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

b. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

- 1) Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
- 2) Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 3) Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

8. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah menjaga jumlah ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok agar tetap stabil. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING

- 1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
- 2) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

9. Nilai SAKIP

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan Nilai SAKIP sesuai dengan target dengan Predikat BB.. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

menyesuaikan rencana kerja. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan disajikan pada table berikut ini:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RKPD 2026		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026		Catatan Penting
				TARGET 2026	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			23.468.324.128		23.468.324.128	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			23.468.324.128		23.468.324.128	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			4.878.135.423		4.878.135.423	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			2.436.416.682		2.436.416.682	
1	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	BB(70,15)	16.153.772.023	BB(70,15)	16.153.772.023	Disesuaikan dengan Kebutuhan
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85		85		
			Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD	70,01		70,01		
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai jadwal	100%	400.073.230 -	100%	400.073.230 -	
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan adm keuangan yang difasilitasi	100%	13.301.493.703 -	100%	13.301.493.703 -	
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	100%	37.117.500 -	100%	37.117.500 -	
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	100%	-	
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	857.376.810 -	100%	857.376.810 -	
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	365.095.980	100%	365.095.980	
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	738.404.800 -	100%	738.404.800 -	
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah	100%	454.210.000 -	100%	454.210.000 -	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RKPD 2026		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026		Catatan Penting
				TARGET 2026	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	<i>Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi</i>	100%	4.878.135.423	100%	4.878.135.423	Target Kinerja Disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	<i>Persentase Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar</i>	100%				
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	<i>Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) yang terlayani secara tepat waktu</i>	100%				
3	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya</i>	100%				Disesuaikan dengan Kebutuhan
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	<i>Persentase sarana prasarana perdagangan sesuai standar</i>	100%				
4	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	<i>Persentase Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</i>	80%	2.572.427.500	80%	2.572.427.500	Target Persentase Kinerja Realisasi Pupuk disesuaikan dengan hasil Rakortekrenbang
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</i>	12 Laporan		12 Laporan		
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>	4 Laporan	2.500.307.500	4 Laporan	2.500.307.500	
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi</i>	4 Laporan	72.120.000	4 Laporan	72.120.000	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RKPD 2026		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026		Catatan Penting
				TARGET 2026	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

5	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	<i>Nilai Ekspor Barang</i>	2,34 USD Milyar	149.520.000	2,34 USD Milyar	149.520.000	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	<i>Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi</i>	50%	149.520.000	50%	149.520.000	-
6	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 2. Persentase Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD	100% 100%	1.569.833.223	100% 100%	1.569.833.223	Target Kinerja Disesuaikan dengan Renstra dan Hasil Rakortekrenbang
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</i>	70%	402.000.000	70%	402.000.000	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD BPSMB</i>	100%	1.057.713.223	100%	1.057.713.223	
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</i>	30%	110.120.000	30%	110.120.000	
7	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	<i>Persentase Promosi Produk Lokal yang di fasilitasi/ dilaksanakan</i>	66%	586.354.700	66%	586.354.700	Target Kinerja Disesuaikan dengan Renstra
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	<i>Persentase Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri</i>	65%	586.354.700	65%	586.354.700	
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Persentase Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	10 UMKM	-	10 UMKM	-	
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	1 LAPORAN	-	1 LAPORAN	-	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RKPD 2026		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026		Catatan Penting
				TARGET 2026	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			2.436.416.682		2.436.416.682	
1	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi sektor industri dan kawasan industri	100%	2.283.416.682	100%	2.283.416.682	Target Kinerja Disesuaikan dengan Renstra dan Hasil Rakortekrenbang
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Penyelesaian penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi	45,45%	2.283.416.682	45,45%	2.283.416.682	
2	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100%	87.000.000	100%	87.000.000	Disesuaikan dengan Kebutuhan
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi sesuai aturan yang berlaku	100%	87.000.000	100%	87.000.000	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	<i>Persentase ketersediaan Informasi Industri secara lengkap. Akurat dan terkini</i>	100%	66.000.000	100%	66.000.000	Target Kinerja Disesuaikan dengan Renstra
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	<i>Persentase Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang mutakhir</i>	100%	66.000.000	100%	66.000.000	
JUMLAH					22.582.772.674,00		22.582.772.674,00	

1.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh dari Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Lintas OPD dan Musyawarah Rencana Pembangunan. Untuk urusan perdagangan dan perindustrian, usulan ini terutama ditampung melalui Forum OPD yang melibatkan perwakilan tiap-tiap Kabupaten/kota yang menangani urusan perdagangan dan perindustrian. Usulan-usulan ini kemudian disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan-usulan dimaksud seperti:

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan)	11 Kabupaten/ Kota dalam Prov. Jambi	Periode pengendalian harga dan informasi ketersediaan stok Bapok dan Bapokting	1 Kali Operasi Pasar	
2	Program Pengembangan Ekspor (Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam	1 dari 11 Kabupaten/ Kota dalam Prov. Jambi	Jumlah Produk Ekspor Unggulan Provinsi Jambi	1 Pembinaan/ Pelatihan Usaha Ekspor	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

	Provinsi)				
3	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota)	11 Kabupaten/ Kota dalam Prov. Jambi	Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Kegiatan Pengawasan	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi)	- Kerinci - Sarolangun - Muaro Jambi - Tanjung Jabung Barat - Bungo - Tanjung Jabung Timur	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	- 8 Pelatihan IKM - 20 Sertifikat Halal - 4 Paket Bantuan Alat IKM	
5	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas))	- Muaro Jambi - Tanjung Jabung Timur	Jumlah Data dan Informasi Industri Berbasis SIINas Periode penyampaian informasi Industri Kewenangan Provinsi	Sosialisasi	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

a. Kedaulatan Pangan dan Energi:

Fokus pada penguatan ketahanan pangan dan energi nasional melalui program seperti optimalisasi Bulog, pengembangan food estate, peningkatan penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan sampah.

b. Ekonomi yang Produktif dan Inklusif:

Menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan merata. Ini diwujudkan melalui program-program seperti digitalisasi pendidikan, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan infrastruktur.

Arah kebijakan RKP 2026 difokuskan pada tiga pilar utama:

1. Meneguhkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Air

- Peningkatan kapasitas produksi pangan nasional (padi, jagung, kedelai, hortikultura, peternakan, perikanan).
- Penguatan cadangan logistik pangan dan efisiensi rantai pasok.
- Diversifikasi pangan lokal dan pengendalian inflasi bahan pokok.
- Peningkatan ketahanan dan transisi energi menuju energi bersih dan terbarukan.
- Pengelolaan sumber daya air secara terpadu (irigasi, waduk, dan konservasi air).

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

2. Mewujudkan Ekonomi yang Produktif, Bernilai Tambah, dan Berdaya Saing

- Mendorong **hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA)** dan peningkatan nilai tambah nasional.
- Penguatan **ekosistem UMKM dan koperasi** agar naik kelas melalui digitalisasi dan akses pembiayaan.
- Peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas melalui **pendidikan vokasi, riset, dan inovasi**.
- Peningkatan investasi, kemudahan berusaha, serta reformasi regulasi dan birokrasi.
- Pengembangan **ekonomi hijau dan ekonomi biru** sebagai sumber pertumbuhan baru.
- Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, transportasi, air minum, sanitasi, dan perumahan rakyat.

3. Memperkuat Inklusivitas dan Pemerataan Pembangunan

- Penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem hingga **0%**.
- Pengurangan kesenjangan antarwilayah, terutama pembangunan wilayah timur dan daerah tertinggal.
- Program **Makan Bergizi Gratis (MBG)** untuk anak sekolah dan masyarakat rentan.
- Peningkatan kualitas layanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
- Pemberdayaan ekonomi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- Penguatan tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, dan reformasi birokrasi.

Arah kebijakan RKP Tahun 2026:

1. Penguatan SDM:

Melalui program prioritas seperti sekolah rakyat dan digitalisasi pendidikan.

2. Pemberdayaan Masyarakat:

Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan program pengentasan kemiskinan terpadu.

3. Penyediaan Layanan Dasar:

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

Fokus pada penyediaan akses layanan dasar secara merata di seluruh masyarakat.

4. **Infrastruktur dan Wilayah:**

Membangun infrastruktur yang berkualitas, termasuk pembangunan 3 juta unit rumah, dan memastikan pembangunan wilayah yang inklusif dan mengurangi kesenjangan.

5. **Lingkungan Hidup:**

Mengembangkan program lingkungan yang terintegrasi, seperti pengelolaan sampah dan Giant Sea Wall untuk mengatasi masalah lingkungan.

Sedangkan prioritas pembangunan diarahkan untuk:

1. **Penguatan SDM dan Daya Saing Daerah**
2. **Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik**
3. **Ketahanan Pangan, Energi, dan Lingkungan**
4. **Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Inklusif**
5. **Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan**

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.1.1 Kementerian Perdagangan

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan tahun 2026 ditujukan untuk memperkuat agenda pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Kementerian perdagangan berupaya mendukung Prioritas Nasional (PN) yaitu pada:

Prioritas Indikator Kinerja Kemendag 2026

Kemendag menargetkan beberapa indikator kinerja utama untuk 2026:

Indikator	Target 2026
Kontribusi ekspor barang & jasa terhadap PDB	21,9%
Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor dunia	1,18%
Nilai ekspor jasa Indonesia	US\$ 32,62 miliar
Pangsa pasar nilai ekspor dalam rantai nilai global	1,05%
Nilai total perdagangan antarwilayah (dalam negeri)	Rp 2.133 triliun

Arah Kebijakan Utama Kemendag 2026

Untuk mencapai target-kinerja tersebut, Kemendag menetapkan **tiga arah kebijakan utama**:

1. Pengamanan Pasar Dalam Negeri

Meliputi:

- Fasilitasi kemitraan pemasaran dan branding produk lokal.
- Program “Gaspol” (Gerakan Kamis Pakai Lokal) untuk mendorong penggunaan produk lokal.
- Kebijakan anti-circumvention atau kebijakan penghindaran pengenaan tarif dan hambatan impor agar industri dalam negeri terlindungi dari praktik tidak fair.

2. Perluasan Pasar Ekspor

Termasuk:

- Penguatan diplomasi perdagangan internasional.
- Peluang pasar baru (termasuk pasar prospektif di Afrika, Amerika Latin).
- Penghapusan atau pengurangan hambatan perdagangan (tarif, non-tarif) melalui perjanjian internasional dan promosi produk luar negeri.

3. Peningkatan UMKM “BISA Ekspor” (Berani Inovasi, Siap Adaptasi)

Fokus pada:

- Fasilitasi inovasi desain produk dan kesiapan standar ekspor.
- Business matching dan pitching untuk UMKM pada pasar luar negeri.
- Peran agregator dan penggunaan platform/promosi digital untuk memperluas akses pasar luar negeri.

Strategi Pelaksanaannya

Beberapa strategi dan inisiatif pendukung agar arah kebijakan bisa terlaksana :

- Memperkuat regulasi perdagangan, termasuk penegakan hukum terkait perdagangan, standar produk, dan ketentuan antidumping / anti-circumvention.
- Optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri: pasar rakyat, distribusi antarwilayah, sarana logistik perdagangan.
- Integrasi sistem informasi perdagangan yang mendukung akses pasar ekspor dan transparansi.
- Program fasilitasi promosi, branding, dan sertifikasi produk untuk mendukung UMKM.

3.1.2 Kementerian Perindustrian

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian pada Tahun 2024 difokuskan pada upaya untuk mengatasi isu utama pembangunan industry melalui:

Arah Kebijakan & Program Prioritas

Untuk mencapai target-target di atas, Kemenperin menetapkan sejumlah arah kebijakan dan program prioritas:

1. Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Mendukung IKM agar lebih produktif, mampu inovasi, lebih kuat dari sisi teknologi dan kapasitas produksi.

2. Penciptaan Wirausaha Baru

Menumbuhkan entrepreneurship dalam industri agar lebih banyak unit usaha, terutama di sektor hilir, daerah, dan produk dengan nilai tambah tinggi.

3. Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam

Mendorong pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi dalam negeri agar nilai tambah tetap berada di dalam negeri.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

4. **Restrukturisasi Mesin & Teknologi**

Modernisasi peralatan industri agar lebih efisien, adaptif terhadap teknologi bersih, ramah lingkungan, dan mendukung produktivitas tinggi.

5. Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, pendidikan teknis, kompetensi agar sesuai standar industri, termasuk teknologi baru.

6. **Pengembangan Industri Halal**

Memperkuat industri halal sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar, baik domestik maupun ekspor.

7. **Peningkatan Pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)**

Mengoptimalkan penggunaan material, komponen dan input lokal dalam produk industri agar menguatkan rantai nilai nasional.

8. **Percepatan Pembangunan Kawasan Industri**

Memperluas pembangunan kawasan industri, termasuk di luar Jawa, untuk pemerataan pertumbuhan industri.

9. **Transformasi Industri Hijau dan Berkelanjutan**

- Efisiensi energi dalam proses produksi.
- Penggunaan teknologi bersih dan ramah lingkungan.
- Pengurangan emisi karbon sesuai target di atas.

10. **Pemberdayaan Pasar Ekspor dan Daya Saing Global**

Meningkatkan akses ke pasar internasional, memperkuat promosi produk ekspor manufaktur, dan memperbaiki kualitas produk agar sesuai standar global.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di pada satu tahun mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

A. TUJUAN

Adapun tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi dan permasalahan-permasalahan bidang perindustrian dan perdagangan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

Provinsi Jambi. Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi maka **ditetapkan tujuan** Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Daya Saing Industri dan Nilai Tambah Perdagangan”** dengan Indikator :

1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
2. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

B. SASARAN

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, maka disusunlah **Sasaran** Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah **“ Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan”**.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas, ditetapkan sasaran berupa terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator sasaran adalah :

a. Nilai SAKIP

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi melalui program/kegiatannya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Daya Saing Industri dan Nilai Tambah perdagangan	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	1.1.Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (Milyar)	32.19 M

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		dan Sektor Perdagangan	2 2. Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Milyar)	46.41 M

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

3.3.1 Faktor yang Menjadi Bahan Petimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Provinsi Jambi untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program gubernur, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. RPJMD Provinsi Jambi disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2029, dimana Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 - 2029, yaitu :

“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”

- Jambi MANTAP** : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.
- Berdaya saing** : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya

lapangan dan kesempatan kerja.

Berkelanjutan : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut:

Pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Pembangunan, kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi berdasarkan Misi Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis yang memiliki sasaran sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital.
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Misi 2 :

2. Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah yang memiliki sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah.
 - b. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro .
 - c. Meningkatnya skala ekonomi masyarakat dan daerah .
 - d. Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Misi 3 :

3. Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial yang memiliki sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan
 - c. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat
 - d. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

Meningkatnya sumber daya manusia terdidik, berkebudayaan maju dan berkesetaraan gender.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, menempatkan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan terutama untuk mendukung Misi 2 (dua) yaitu **“Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata”**.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

Dalam upaya mewujudkan Misi ke 2 (dua) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan pilihan perindustrian dan perdagangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pilihan Perindustrian, melalui program antara lain:
 - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
2. Urusan Pilihan Perdagangan, melalui program antara lain :
 - a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting
 - d. Program Pengembangan Ekspor
 - e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain :

1. Lemahnya Koordinasi Antar Instansi (Dinas terkait : Dinas Koperasi, , Dinas Pertanian, Pemda dll)
2. Rendahnya Kualitas SDM (Pengetahuan , Keterampilan, Maupun Sikap)
3. Kondisi infrastruktur dasar dan penunjang (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai baik kuantitas maupun kualitas untuk mendukung kelancaran arus perdagangan barang/jasa dan kegiatan ekspor/impor perdagangan komoditi antara Negara dan Daerah.
4. Persaingan yang tidak seimbangan dengan produk industri dari luar yang memiliki keunggulan (pasar bebas),
5. Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi (Entrepreneurship),
6. Kualitas produk industri kecil dan kerajinan rata-rata masih rendah.

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain :

1. Dukungan Regulasi yang Kuat:

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

Adanya peraturan sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sangat penting. Contohnya, penerapan peraturan terkait kualitas produk, standar usaha, dan prosedur perizinan yang jelas akan memfasilitasi pelayanan dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

Diklat teknis dan pelatihan bagi pengelola Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Ini akan berdampak pada pelayanan yang lebih berkualitas dan efektif.

3. Infrastruktur yang Memadai:

Tersedia infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, listrik, dan akses internet yang memadai akan mempercepat proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk. Hal ini juga akan menarik investasi dan meningkatkan daya saing produk lokal.

4. Sinergi dengan Stakeholder:

Kerjasama dengan berbagai pihak, seperti asosiasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah, akan meningkatkan efektivitas pelayanan dan mencapai tujuan pembangunan bersama.

5. Pengelolaan Informasi yang Efektif:

Akses informasi yang mudah dan cepat mengenai peraturan, pasar, dan peluang investasi akan membantu pelaku industri dan pedagang dalam mengambil keputusan. Ini dapat diwujudkan melalui website, media sosial, dan aplikasi yang interaktif.

6. Pengawasan dan Pengendalian yang Ketat:

Pengawasan terhadap kualitas produk, keamanan pangan, dan praktik usaha yang tidak sehat akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan lingkungan usaha yang adil.

7. Pengembangan Produk Unggulan:

Pemetaan potensi lokal, pengembangan produk unggulan, dan promosi produk lokal akan meningkatkan daya saing produk daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

8. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Industri Kecil dan Menengah
9. Dukungan potensi sumberdaya alam yang memadai untuk memenuhi bahan baku industri berbasis agroindustri
10. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global.

Dengan adanya faktor-faktor pendorong ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029.

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, menempatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terutama untuk mendukung Misi 2 (dua) yaitu **“Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata”**

Dalam upaya mewujudkan Misi ke-2 (dua) tersebut, dengan Pagu Indikatif sebesar Rp 20.417.270.682,00 maka ada 8 program dan 15 Kegiatan urusan pilihan perindustrian dan perdagangan yang akan dilakukan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. **Urusan Pilihan Perdagangan**, melalui program dan Kegiatan:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - 1) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan; dan
 - 2) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

- c. Program Pengembangan Ekspor;
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - 1) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 - 1) Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
- 2. Urusan Pilihan Perindustrian, melalui program dan Kegiatan:**
- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
 - 1) Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
 - 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 1) Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

3.3.3 Perbandingan Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal

Terdapat perbedaan yang signifikan antara Rencana Pendanaan pada Rancangan Awal Renja yang berjumlah **23.468.324.128,00** dengan dengan Pagu Indikatif pada Rancangan Akhir Renja yang berjumlah Rp **21.886.952.457,00**. Rincian perbedaannya dapat dilihat pada table berikut:

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RENJA 2026		RANCANGAN AKHIR RENJA 2026		Selisih Rencana Pendanaan dengan Pagu Indikatif (Rp)
				TARGET 2026	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			23.468.324.128,00		21.886.952.457,00	-1.581.371.671,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			23.468.324.128,00		21.886.952.457,00	-1.581.371.671,00
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			4.878.135.423		4.448.531.792	-429.603.631
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			2.436.416.682		1.994.738.365	-441.678.317
1	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	BB(70,15)	16.153.772.023	BB(70,15)	15.443.682.300	-710.089.723
			Indeks KepuaPsan Masyarakat	85		85		
			Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	70,01		70,01		
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai jadwal	100%	400.073.230	100%	375.880.000	-24.193.230
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan adm keuangan yang difasilitasi	100%	13.301.493.703	100%	13.470.000.000	168.506.297

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah</i>	100%	37.117.500	100%	3.390.000	-33.727.500
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	0	100%	320.000.000	320.000.000
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	857.376.810	100%	321687500	-535.689.310
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	365.095.980	100%	100.000.000,00	-265.095.980
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	738.404.800	100%	602.724.800,00	-135.680.000
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah</i>	100%	454.210.000	100%	250.000.000,00	-204.210.000
2	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	<i>Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi</i>	100%	0,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	<i>Persentase Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar</i>	100%		100%	10.000.000,00	10.000.000
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	<i>Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) yang terlayani secara tepat waktu</i>	100%			0	0
3	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya</i>	100%	0	100%	150.000.000,00	150.000.000,00
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	<i>Persentase sarana prasarana perdagangan sesuai standar</i>	100%	0	100%	150.000.000,00	150.000.000
4	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	<i>Persentase Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</i>	80%	2.572.427.500	80%	2.835.307.037	262.879.537,00
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</i>	12 Laporan	0	12 Laporan	255.000.000,00	255.000.000
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>	4 Laporan	2.500.307.500	4 Laporan	2.500.307.500	0

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi</i>	'4 Laporan	72.120.000	'4 Laporan	79.999.537,00	7.879.537
5	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	<i>Nilai Ekspor Barang</i>	2,34 USD Milyar	149.520.000	2,34 USD Milyar	130.735.000,00	- 18.785.000,00
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	<i>Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi</i>	50%	149.520.000	50%	130.735.000,00	- 18.785.000,00
6	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>1. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen</i> <i>2. Persentase komoditi Persentase Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD</i>	100% 100%	1.569.833.223		1.155.082.755	-414.750.468,00
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaksanaan Perlindungan</i>	70%	402.000.000	70%	204.837.200,00	- 197.162.800,00
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD BPSMB</i>	100%	1.057.713.223	100%	875.245.555,00	- 182.467.668,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</i>	30%	110.120.000	30%	75.000.000,00	-	35.120.000,00
7	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	<i>Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri</i>	60%	586.354.700,00	60%	167.407.000,00	-	-418.947.700,00
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	<i>Persentase Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri</i>	65%	586.354.700	65%	156.637.000,00	-	429.717.700,00
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Persentase Pelaksanaan Pemasaran</i>	10 UMKM	0	10 UMKM	5.400.000,00	-	5.400.000,00
			<i>Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>					-	
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	1 LAPORAN	0	1 LAPORAN	5.370.000,00	-	5.370.000,00
1	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Persentase Realisasi Investasi sektor industri dan kawasan industri</i>	100%	2.283.416.682	100%	1.829.738.365,00	-	453.678.317,00
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Persentase Penyelesaian penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi</i>	45,45%	2.283.416.682	45,45%	1.829.738.365	-	453.678.317,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

2	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	<i>Persentase Izin sesuai Kewenangan yang dikendalikan</i>	20%	87.000.000,00	20%	90.000.000,00	3.000.000,00
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	'Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi sesuai aturan yang berlaku	100%	87.000.000	100%	90.000.000,00	3.000.000,00
3	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	<i>Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini</i>	100%	66.000.000	100%	75.000.000,00	9.000.000,00
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	<i>Persentase Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang mutakhir</i>	100%	66.000.000	100%	75.000.000,00	9.000.000,00
JUMLAH					23.468.324.128,00		21.886.952.457,00	- 1.581.371.671,00

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2026

1. Gambaran Umum

Total **rencana pendanaan** Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi pada Rancangan Awal Renja Tahun 2026 sebesar Rp23.468.324.128,00, sementara pada **Rancangan Akhir Renja Tahun 2026** setelah penyesuaian pagu indikatif menjadi **Rp21.886.952.457,00**.

Terdapat **selisih penurunan anggaran sebesar Rp1.581.371.671,00**, yang disebabkan oleh penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah, efisiensi kegiatan, dan penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah serta kebijakan RKPD Tahun 2026.

Urusan pemerintahan ini termasuk dalam **Urusan Pemerintahan Pilihan**, yang terdiri atas dua bidang utama, yaitu:

- **Bidang Perdagangan**, dengan pagu indikatif Rp4.448.531.792,00 (turun Rp429.603.631,00), dan
- **Bidang Perindustrian**, dengan pagu indikatif Rp1.994.738.365,00 (turun Rp441.678.317,00).

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bertujuan meningkatkan tata kelola dan kinerja kelembagaan dengan indikator utama **Nilai SAKIP BB (70,15)** dan **Indeks Kepuasan Masyarakat 85**. Rencana pendanaan awal sebesar **Rp16.153.772.023,00** disesuaikan menjadi **Rp15.443.682.300,00**, mengalami penurunan **Rp710.089.723,00**.

Perubahan terbesar terjadi pada kegiatan administrasi umum dan pengadaan barang milik daerah yang mengalami rasionalisasi anggaran, sementara kegiatan administrasi keuangan justru mengalami peningkatan sebesar Rp168.506.297,00.

Rincian penting:

- **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:** turun Rp24,19 juta.
- **Administrasi Keuangan:** naik Rp168,50 juta.
- **Administrasi Barang Milik Daerah:** turun Rp33,72 juta.
- **Administrasi Kepegawaian:** naik Rp320 juta (karena sebelumnya belum dialokasikan).
- **Administrasi Umum:** turun Rp535,68 juta.

- **Pengadaan Barang Milik Daerah:** turun Rp265,09 juta.
- **Penyediaan Jasa Penunjang:** turun Rp135,68 juta.
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah:** turun Rp204,21 juta.

b. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini mendukung fasilitasi dan pengendalian usaha perdagangan, khususnya bahan berbahaya dan penerbitan surat keterangan asal (SKA). Terdapat kenaikan alokasi sebesar **Rp10.000.000,00** karena penyesuaian kebutuhan operasional pengawasan bahan berbahaya untuk pengecer terdaftar.

c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini mendukung peningkatan sarana dan prasarana perdagangan daerah. Rencana pendanaan awal **Rp0**, namun dalam pagu indikatif dialokasikan **Rp150.000.000,00**, menunjukkan adanya **penambahan Rp150 juta** untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas.

d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini menjadi instrumen penting menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok di Provinsi Jambi. Terdapat peningkatan pagu sebesar **Rp262.879.537,00**, dari Rp2.572.427.500,00 menjadi Rp2.835.307.037,00.

Kegiatan utama mencakup:

- Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi (naik Rp7,88 juta).
- Penyusunan laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok (penambahan Rp255 juta).

e. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan untuk meningkatkan ekspor daerah dengan target **nilai ekspor 2,34 miliar USD**.

Terjadi efisiensi anggaran sebesar **Rp18.785.000,00**, dari Rp149.520.000,00 menjadi Rp130.735.000,00, tanpa mengubah target kinerja yang tetap 50%.

f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini melindungi masyarakat dari produk yang tidak sesuai standar dan memperkuat sistem pengawasan barang beredar.

Total pagu turun dari Rp1.569.833.223,00 menjadi Rp1.155.082.755,00 (**penurunan Rp414.750.468,00**).

Rincian perubahan:

- **Perlindungan Konsumen:** turun Rp197,16 juta.
- **Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk (BPSMB):** turun Rp182,47 juta.
- **Pengawasan Barang Beredar:** turun Rp35,12 juta.

g. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini mendukung promosi produk lokal dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di pasar modern.

Terjadi penurunan signifikan sebesar **Rp418.947.700,00**, dari Rp586.354.700,00 menjadi Rp167.407.000,00.

Kegiatan yang masih dipertahankan meliputi:

- Promosi produk dalam negeri (Rp156,63 juta).
- Pemasaran produk UMKM (Rp5,4 juta).
- Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (Rp5,37 juta).

3. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini mendukung pelaksanaan **Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi** serta mendorong investasi sektor industri.

Total anggaran turun dari **Rp2.283.416.682,00** menjadi **Rp1.829.738.365,00** atau berkurang **Rp453.678.317,00**, akibat efisiensi pada kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri.

Meskipun demikian, target kinerja tetap 100% dengan capaian penyusunan dokumen RPIP sebesar 45,45%.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini memastikan proses perizinan industri sesuai ketentuan dan dilaksanakan tepat waktu.

Alokasi naik sedikit sebesar **Rp3.000.000,00**, dari Rp87 juta menjadi Rp90 juta, untuk mendukung peningkatan pelayanan rekomendasi teknis IUI dan IPUI berbasis sistem OSS.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Program ini bertujuan meningkatkan ketersediaan data dan informasi industri yang akurat dan terkini melalui sistem SIINas.

Pagu naik sebesar **Rp9.000.000,00**, dari Rp66 juta menjadi Rp75 juta, untuk memperkuat pengelolaan data dan integrasi sistem informasi industri provinsi.

4. Kesimpulan Umum

Secara keseluruhan, **Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 Disperindag Provinsi Jambi** disusun dengan tetap mempertahankan target kinerja strategis di tengah penyesuaian anggaran sebesar **Rp1,58 miliar**.

Prioritas diarahkan pada:

- Peningkatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik.
- Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan perlindungan konsumen.

- 
- Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026
- Penguatan promosi ekspor dan penggunaan produk dalam negeri.
 - Pembangunan dan pengendalian sektor industri yang berdaya saing.

Penyesuaian dilakukan secara selektif pada kegiatan administratif, pengadaan, dan operasional yang dinilai masih dapat dioptimalkan tanpa mengganggu capaian kinerja utama perangkat daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.3.4 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		20.740.367.074		21.777.385.428
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		1.884.393.391		1.978.613.061
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		3.747.824.555		3.935.215.783
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	BB(70,15)	BB(70,15)	15.863.556.584
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	
		Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD	70,01	70,01	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.30.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai jadwal	100%	276.168.000	100%	289.976.400
3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	261.140.000,00	7 Dokumen	274.197.000,00
3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.028.000,00	1 Laporan	15.779.400,00
3.30.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan adm keuangan yang difasilitasi	100%	13.473.722.095,00	100%	14.147.408.199,75
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/14 Bulan	13.262.443.095,00	100 Orang/14 Bulan	13.925.565.249,75
3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	185.880.000,00	1 Dokumen	195.174.000,00
3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	4 Laporan	25.399.000,00	4 Laporan	26.668.950,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.30.1.1,05	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	100%	3.390.023,00	100%	3.559.524,15
3.30.01.1.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	3.390.023	7 Laporan	3.559.524,15
3.30.1.1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	100%	-
3.30.01.1.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	1 Paket	-
3.30.01.1.0 5.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-
3.30.01.1.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	-	20 Orang	-
3.30.1.1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	511.293.524,00	100%	536.858.200,20
3.30.01.1.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	-	1 Paket	-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

	Bangunan Kantor					
3.30.01.1.0 6.0002	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	'1 Paket	-	'1 Paket	-	
3.30.01.1.0 6.0005	Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan	'1 Paket	59.687.500,00	'1 Paket	62.671.875,00	
3.30.01.1.0 6.0006	Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	'12 Dokumen	12.000.000,00	'12 Dokumen	12.600.000,00	
3.30.01.1.0 6.0009	Penyelenggara Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	'12 Laporan	439.606.024,00	'12 Laporan	461.586.325,20	
3.30.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	100%	-
3.30.01.1.0 7.0006	Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	0	5 Unit	0	
3.30.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha		602.724.800,00		632.861.040,00	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

	n Daerah							
3.30.01.1.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat		1 Laporan	161.478.000	1 Laporan	169.551.900,00	
3.30.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	421.926.800	1 Laporan	443.023.140,00	
3.30.01.1.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	19.320.000	1 Laporan	20.286.000,00	
3.30.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah		100%	240.850.686,00	100%	252.893.220,30	
3.30.01.1.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		30 Unit	156.550.686	30 Unit	164.378.220,30	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.30.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	19.500.000	5 Unit	20.475.000,00
3.30.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	64.800.000	20 Unit	68.040.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			3.747.824.555		3.935.215.783
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	88%	-	88%	-
3.30.02.1.0 3	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Persentase Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	88%		88%	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.30.02.1.0 3.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	'Jumlah Pemenuhan komitmen pemetiksaan sarana Distribusi bahan berbahaya pedagang besar/ distributor bahan berbahaya sebagai lampiran surat rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	'1 Dokumen	-	'1 Dokumen	-
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	2.363.848.000	100%	2.482.040.400
3.30.04.1.0 1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	'Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	26.250.000
3.30.04.1.0 1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6 laporan	15.000.000	6 laporan	15.750.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.30.04.1.0 1.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6 laporan	10.000.000	6 laporan	10.500.000,00
3.30.04.1.0 2	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4 Laporan	2.300.000.000,00	4 Laporan	2.415.000.000,00
3.30.04.1.0 2.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	2.300.000.000	4 Laporan	2.415.000.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.30.04.1.0 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	'4 Laporan	38.848.000	'4 Laporan	40.790.400
3.30.04.1.0 3.0001	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.500.000,00
3.30.04.1.0 3.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 laporan	-	1 laporan	-
3.30.04.1.0 3.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1 laporan	28.848.000	1 laporan	30.290.400,00
3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	2,49 USD Milyar	59.808.000	2,49 USD Milyar	62.798.400

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.30.05.1.0 1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang	50%	59.808.000	50%	62.798.400
3.30.05.1.0 1.0001	Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	'2 Pelaku Usaha	-	'2 Pelaku Usaha	-
3.30.05.1.0 1.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	'2 Produk	59.808.000	'2 Produk	62.798.400,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDI SASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100%	1.155.082.755	100%	1.212.836.893
3.30.06.1.0 1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100%	204.837.200	100%	215.079.060

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.30.06.1.0 1.0001	Pemberdayaa n Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	5.000.000	3 BPSK	5.250.000,00
.30.06.1.01 .0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	2 LPKSM	5.000.000	2 LPKSM	5.250.000,00
3.30.06.1.0 1.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20 Pengaduan	194.837.200	20 Pengaduan	204.579.060,00
3.30.06.1.0 2	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD BPSMB	100%	875.245.555,00	100%	919.007.832,75
3.30.06.1.0 2.0002	Pengembanga n Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	'210 Laporan	541.460.947	'210 Laporan	568.533.994,35
3.30.06.1.0 2.0003	Pengembanga n Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan				
3.30.06.1.0 2.0004	Pengembanga n Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	'620 Sertifikat	318.656.235	'620 Sertifikat	334.589.046,75

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.30.06.1.0 2.0006	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	'22 Produk	15.128.373	'22 Produk	15.884.791,65
3.30.06.1.0 3	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	30%	75.000.000,00	30%	78.750.000,00
3.30.06.1.0 3.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	78.750.000,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang di fasilitasi/ dilaksanakan	66%	169.085.800	66%	177.540.090
3.30.07.1.0 1	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	65%	158.315.800,00	65%	166.231.590,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.30.07.1.0 1.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, market place, perhotelan dan jasa akomodasi	4 UMKM	158.315.800	4 UMKM	166.231.590,00
3.30.07.1.0 2	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	'10 UMKM		'10 UMKM	
3.30.07.1.0 2.0001	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	10 UMKM	5.400.000	10 UMKM	5.670.000,00
3.30.07.1.0 3	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	'1 LAPORAN		'1 LAPORAN	
3.30.07.1.0 3.0003	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 LAPORAN	5.370.000	1 LAPORAN	5.638.500,00
3.31	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG			1.884.393.391,00		1.978.613.060,55

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

	PERINDUSTRIAN					
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi sektor industri dan kawasan industri	100	1.827.738.391,00	100	1.919.125.310,55
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Penyelesaian penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi	45,45	1.827.738.391	45,45	1.919.125.311
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	'1 Dokumen		'1 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	'1 Dokumen	50.000.000	'1 Dokumen	52.500.000,00
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	'1 Dokumen	200.338.365	'1 Dokumen	210.355.283,25

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.31.02.1.0 1.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	'1 Dokumen	200.000.000	'1 Dokumen	210.000.000,00
3.31.02.1.0 1.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	'1 Dokumen	1.332.400.026	'1 Dokumen	1.399.020.027,30
3.31.02.1.0 1.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	'2 Dokumen	30.000.000	'2 Dokumen	31.500.000,00
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi, Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	'1 Dokumen	15.000.000	'1 Dokumen	15.750.000,00
3.31.3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100%	36.855.000,00	100%	38.697.750,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.31.03.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	'Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi sesuai aturan yang berlaku	100%	36.855.000	100%	38.697.750
3.31.03.1.0 1.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	'1 Dokumen	26.855.000	'1 Dokumen	28.197.750,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.31.03.1.0 1.0003	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	'1 Dokumen	10.000.000	'1 Dokumen	10.500.000,00
-----------------------	---	--	------------	------------	------------	---------------

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan Informasi Industri secara lengkap. Akurat dan terkini	100%	19.800.000,00	100%	20.790.000,00
3.31.04.1.0 1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang mutakhir	100%	19.800.000	100%	20.790.000,00
3.31.04.1.0 1.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang mutakhir	1 DOKUMEN	-	1 DOKUMEN	-
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 DOKUMEN	-	1 DOKUMEN	-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 DOKUMEN	-		1 DOKUMEN	-
--	---	--	-----------	---	--	-----------	---

Total alokasi pendanaan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan tahun 2026 sebesar **Rp20.740.367.074** dengan prakiraan meningkat pada tahun 2027 menjadi **Rp21.777.385.428**. Urusan ini terdiri atas dua bidang utama, yaitu **Bidang Perdagangan** dan **Bidang Perindustrian**.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Total anggaran Bidang Perdagangan pada tahun 2026 mencapai **Rp3.747.824.555** dengan prakiraan naik menjadi **Rp3.935.215.783** pada tahun 2027. Program-program yang direncanakan mencakup kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, perlindungan konsumen, pengembangan ekspor, serta promosi produk dalam negeri.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Fokus pada peningkatan kinerja perangkat daerah dengan indikator utama **nilai SAKIP BB (70,15)** dan **Indeks Kepuasan Masyarakat 85**. Beberapa kegiatan meliputi:

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak **7 dokumen** dengan anggaran Rp261 juta.
- Evaluasi kinerja perangkat daerah **1 laporan** senilai Rp15 juta.
- Administrasi keuangan dan kepegawaian dengan layanan 100% tepat waktu.
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN untuk **100 orang selama 14 bulan** dengan alokasi Rp13,2 miliar.
- Administrasi umum perangkat daerah dengan berbagai kegiatan, seperti penyediaan bahan bacaan, barang cetakan, dan rapat koordinasi.

Total pagu indikatif untuk kegiatan penunjang ini mencapai **Rp15,108 miliar pada 2026** dan meningkat menjadi **Rp15,863 miliar pada 2027**.

b. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Menitikberatkan pada fasilitasi izin usaha perdagangan dengan capaian 88%. Kegiatan meliputi:

- Pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya untuk pengecer terdaftar.
- Pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya sesuai ketentuan OSS.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini bertujuan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di tingkat provinsi, dengan total anggaran **Rp2,36 miliar pada 2026** meningkat menjadi **Rp2,48 miliar**

pada 2027.

Kegiatan utama meliputi:

- Operasi pasar pangan pokok lintas kabupaten/kota.
- Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi.
- Sinkronisasi dan koordinasi pengendalian harga di tingkat daerah.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini mendukung promosi dan peningkatan nilai ekspor produk unggulan daerah. Target ekspor ditetapkan sebesar **2,49 miliar USD**, dengan pagu Rp59,8 juta (2026) dan Rp62,7 juta (2027).

Kegiatan termasuk penyelenggaraan pameran dagang internasional dan peningkatan citra produk ekspor daerah.

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Difokuskan pada pengawasan barang beredar dan pengujian mutu produk dengan target penanganan pengaduan konsumen 100%.

Beberapa kegiatan penting:

- Pengujian mutu produk oleh UPTD BPSMB dengan **210 laporan pengujian** dan **620 sertifikat kalibrasi**.
- Pemberdayaan konsumen melalui BPSK dan LPKSM aktif di daerah.
- Pengawasan barang dan jasa sesuai ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Total alokasi program ini mencapai **Rp1,15 miliar (2026)** dan meningkat menjadi **Rp1,21 miliar (2027)**.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Mendukung promosi produk lokal dan UMKM dengan target fasilitasi **66% promosi produk lokal**.

Kegiatan meliputi:

- Fasilitasi promosi dan pemasaran produk dalam negeri.
- Sosialisasi peningkatan penggunaan produk lokal.

Total anggaran mencapai **Rp169 juta (2026)** meningkat menjadi **Rp177 juta (2027)**.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

Total pagu indikatif untuk urusan ini sebesar **Rp1.884.393.391 pada 2026** dan **Rp1.978.613.060 pada 2027**.

Fokusnya pada perencanaan pembangunan industri, pengendalian izin industri, dan pengelolaan sistem informasi industri.

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Menargetkan realisasi investasi sektor industri 100%, dengan total alokasi **Rp1,827 miliar (2026)** dan **Rp1,919 miliar (2027)**.

Kegiatan utama:

- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
- Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan sarana, prasarana, serta sumber daya industri.
- Evaluasi pelaksanaan pembangunan industri.
- Pengawasan jaminan produk halal di tingkat provinsi.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Menjamin proses perizinan usaha industri berjalan 100% sesuai ketentuan, dengan total pagu **Rp36,8 juta (2026)** dan **Rp38,7 juta (2027)**.

Kegiatan meliputi:

- Koordinasi pengawasan perizinan sektor industri provinsi.
- Fasilitasi verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha industri melalui SIINas dan OSS RBA.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus pada penyediaan data dan informasi industri yang lengkap, akurat, dan terkini dengan target keterediaan 100%.

Kegiatan mencakup:

- Fasilitasi pengumpulan dan analisis data industri.
- Publikasi informasi melalui sistem SIINas.
- Pemantauan kepatuhan perusahaan industri dalam pelaporan data.

Total pagu indikatif sebesar **Rp19,8 juta pada 2026** dan **Rp20,79 juta pada 2027**.

Rencana tahun 2026–2027 untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian diarahkan untuk:

- Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026

- Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok.
- Memperkuat perlindungan konsumen dan pengawasan mutu produk.
- Mendorong promosi produk dalam negeri serta peningkatan ekspor.

Memperkuat iklim investasi industri dan tata kelola perizinan berbasis sistem digital (SIINas dan OSS RBA).

Bab IV

Penutup

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2026 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang at a Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2025 yang berlandaskan pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2025-2029. merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan selama 1 (tahun) tahun kedepan. Renja ini memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Dalam bidang perindustrian dan perdagangan di Provinsi Jambi, dinamika perubahan lingkungan strategis relatif cepat berubah, dampak pandemi covid 19 yang mempengaruhi aktivitas perindustrian dan perdagangan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor perindustrian dan perdagangan, maka diperlukan terobosan agar program dan kegiatan dapat mengikuti perkembangan jaman dan meningkatkan daya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan implementasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2026 ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi perindustrian dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri unggulan daerah Provinsi Jambi dan optimalisasi pasar dalam dan luar negeri untuk industri Provinsi Jambi.